

EKSISTENSI NEGARA

M. Safa'at Habib*)

Pengaruh globalisasi yang makin terasa di seluruh dunia dewasa ini mendorong sebagian orang mempertanyakan tentang eksistensi "negara". Masih relevankah keberadaan negara di tengah-tengah keperluan manusia yang serba mendunia, sehingga timbul teori tentang The end of the Nation State misalnya. Tetapi mengapa dalam kenyataannya negara-negara masih berdiri dengan kokohnya di seluruh dunia, hal ini tentunya ada alasan yang melatarbelakangi masih bercokolnya negara-negara itu.

Uraian di bawah ini mencoba mengetengahkan sebagian alasan yang memotivasi masih tetap eksistensinya "negara" dalam kehidupan umat manusia, karena memang sebagai sebuah nessesitas publik atau merupakan kondisi yang menghendaki bahwa eksistensi itu memang merupakan keharusan, bagi semua pihak, tidak hanya melihat kepentingan perorangan akan tetapi bagi seluruh komunitas.

Diawali dengan konsep *Zoon Politikon*. Pembahasan diteruskan dengan mempersoalkan perlu tidaknya berdiri sebuah negara bagi komunitas politik yang menempati daerah tertentu. Kemudian uraian mengarah pada adanya pendapat tentang kultus negara, yakni anggapan bahwa

"negara" adalah segala-galanya yang mutlak harus ditaati versus pendapat tentang konsep Negara Hukum. Selanjutnya bentuk dan sistem negara ternyata memerlukan keputusan politik. Uraian ini mengetengahkan "NKRI" (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai sampel Negara yang masih eksis. Akhirnya tulisan ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan, apakah eksistensi negara itu abadi?

Konsep *Zoon Politikon*

Murid pemikir Yunani kuno Plato bernama Aristoteles (384-322 SM), asal Stagira ialah koloni Yunani di Macedonia, anak seorang dokter, 20 tahun menjadi murid Plato, tetapi berbeda pendapat dengannya, Ar-

*) M. Safa'at Habib, Anggota Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB)

istoteles cenderung berfikir "Kebijakan dunia" sedang Plato utopian. Kemudian 12 tahun menjadi pendamping dan pendidik anak raja Philipus, yakni Alexander. Dari ayahnya ia mewarisi subyek medik dan biologi, tertarik pada fisika dan zoolog. serta ilmu pengetahuan alam, sehingga biasa memakai metode observasi dan menimbang data sebelum membuat formula atau *hypothesa*, pakar pertama yang mengetengahkan etika dan politik secara sistematis, sehingga bukunya tentang politik sampai sekarang, sesudah 2.300 tahun lebih masih dianggap sebagai *text book* introduksi penting soal politik.

Ada dua idea pokok mengenai politik, ialah: (1) Bahwa "negara" adalah sebuah komunitas politik, (2) Bahwa komunitas politik dalam negara tersebut adalah komunitas yang tertinggi, sebab meliputi semua jenis komunitas, yang bertujuan "kebaikan yang tertinggi". Tesis awal Aristoteles ialah tentang POLIS, ialah negara kota dengan area tertentu dengan penduduk yang bergabung bersama di dalam suasana kebahagiaan hidup.

Aristoteleslah yang pertama kali mendefinisikan begitu jelas soal negara sebagai komunitas politik, landasan bagi konsepsi organik soal negara, bahkan menganggapnya sebagai ma-

hluk hidup, yakni sebuah mesin yang bisa dipergunakan untuk tujuan yang lebih tinggi. Dengan demikian dia melihat negara sebagai alami, karena dua hal: (1) terbentuknya kelembagaan sosial dari keluarga, menjadi kampung/desa, kemudian jadi negara kota secara historis, kemudian (2) memang dasar alaminya manusia adalah *zoon politikon* artinya binatang politik, mereka perlu berlingkup dalam negara kota tersebut.

Keluarga adalah masyarakat yang paling sederhana dan paling rendah, nilainya paling bawah. Keluarga dibentuk untuk memasok keperluan harian manusia. Asosiasi berikutnya adalah kampung atau desa, yang ternyata lebih kompleks sifatnya, tidak lagi soal pasokan keperluan harian akan tetapi sudah meluas pada masalah pembentukan budaya bersama, yang tidak bisa dipenuhi keluarga. Tahap terakhir adalah yang tertinggi: negara kota atau polis. Kalau keluarga dan desa untuk keperluan hidup harian dan kenyamanan berteman, maka polis adalah untuk penyelenggaraan "kehidupan yang bahagia", maka terwujudlah masyarakat politik yang mampu memanisfestasikan adanya perbuatan-perbuatan mulia yang bukan sekedar hidup berteman seperti pada desa.

Sebagaimana halnya alam bi-

ologi yang terus berkembang, maka komunitas politik manusia juga terus berkembang secara dinamis negara akhirnya menjadi adukan segala pemikiran yang berkembang dalam komunitas politik, keadaan akan menuju yang lebih baik dan lebih sempurna, semua komponen kebaikan terakumulasi dalam kehidupan bernegara, yang tidak diprolehnya dalam keluarga maupun dalam kehidupan kampung atau desa. Kalau dalam keluarga telah terpenuhi nafsu reproduksi dan pemenuhan keperluan pokok manusia, dalam kehidupan desa terpenuhi kepentingan sentimen sosial, maka dalam negara baru terpenuhi keperluan moral yang paling luas yang membentuk kemanusiaan. Semua tahapan keperluan itu akan terus saling terkait. Politik memerlukan kerjasama yang lebih luas, terpenuhi dalam negara.

Memang dalam perkembangan sejarah yang cukup panjang idea tentang negara itu mengalami perubahan dan perluasan. Baru dalam abad 17 ditemukan konsep tentang kedaulatan negara, bahwa negara memiliki otoritas tertinggi dalam politik dalam mengorganisir komunitasnya dan konsep tentang monopoli paksaan otoritas tersebut dalam teritorie tertentu. Maka konsep Aristoteles lebih bersifat *souvereignitas moral* dan bukannya

yang legal atau yang bersifat hukum. Yang dipentingkan adalah keinginan untuk hidup bersama dalam pertemanan, yang diikiat oleh ikatan impersonal.

Perlu Berdirinya Negara bagi Komunitas Politik

Komunitas politik terjadi ketika manusia merasa perlu memupuk pertemanan dalam kehidupan bersama membentuk peradaban yang lebih tinggi. Akal budi manusialah yang menentukan manusia untuk memiliki dan membentuk peradaban.

Manusia merasa perlu secara dasar menyusun tertib masyarakat secara rasional, agar tercapai tertib moral, keadilan dan kesejahteraan bersama.

Sebagai makhluk politik manusia selalu bisa herfikir rasional, di samping sudah tentu sifat-sifat negatif yang terus menempel seperti malas, dengki, emosional, marah dan sebagainya. Maka sejak awal manusia siap sebagai makhluk yang akan membina kehidupan berpolitik dalam komunitas politik dan organisasi politik, hal ini timbul oleh kesadaran rasionalnya. Manusia menganggap perlu menyusun dan mewujudkan ketertiban bagi semua problematik kehidupan bersama dalam komunitas terorganisasi.

Di sinilah kemudian manusia melihat bahwa untuk merea-

liskasikan komunitas politik yang harmonis, bebas dari rasa takut, penuh kebebasan, kesetaraan dan keadilan diperlukan suatu wadah yang kondusif bagi semua, berupa terroire tertentu yang memadahi, yang kemudian dikenal sebagai "negara". Luasnya adalah sangat relatif, sesuai kondisi yang memungkinkan, dulunya terbatas dalam sebuah polis atau kota, kemudian meluas dalam sebuah: "negara bangsa", mungkin nantinya meluas menjadi "negara dunia" dan seterusnya.

Sejak diperkenalkan adanya konsep "geopolitik" pada abad delapan belas, maka istilah "negara bangsa" menjadi sangat populer. Istilah state dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin "status" berarti keadaan, kondisi, posisi atau tempat berdiri, adalah jelas bahwa status itulah yang diperlukan bagi keberadaan komunitas politik mewujudkan cita-cita luhurnya, yakni sebuah keadaan atau kondisi, posisi atau tempat berdiri, yang komunitas politik memiliki otoritas penuh penyelenggaraan hajat besar kemanusiaan yang memiliki teleologi atau tujuan luhur.

Richard Sennet Phd. dari Harvard dan guru besar Humanitas di Universitas New York, dalam bukunya *Authoriy* menyebutkan antara lain, bahwa ikatan erat

yang terjadi dalam komunitas politik sehingga kenekatan mereka mendirikan "negara bangsa" adalah karena adanya "*Emotional Bond*", agar komunitas bisa berfungsi baik, berisikan tiga hal, yakni: (1) loyalitas, (2) otoritas dan (3) fraternitas (ketaatan, kekuasaan, dan pertemanan) yang memiliki konsekuensi politik. Tiga hal itu bisa mengikat manusia dalam komunitas politik. Tiga-tiganya harus terikat menjadi satu agar fungsi negara bisa optimal, tanpa tiga ikatan emosional tersebut keberadaan negara sebagai wadah komunitas politik akan buyar berantakan.

Kultus Negara Versus Hukum

Kuatnya otoritas yang dibangun oleh komunitas politik sendiri dalam bernegara, sering menimbulkan pemerintahan yang otoritarian. Ketaatan seluruh komunitas dimanipulasi untuk mewujudkan otoritas penguasa yang hampir tanpa batas. Di sinilah sistem demokrasi yang dibangun komunitas politik harus menderita di bawah tekanan penguasa yang otoritarian.

G.F.W. Hegel (1770-1831) sebagai pemikir kenegaraan dan filsafat, yang hidup setelah berkecamuknya revolusi Perancis, menulis banyak buku di antaranya *Philosophy of Law* (1821),

karena kekagumannya pada Napoleon Bonaparte dan radikalisme kaum Jacobin Perancis, Hegel menjunjung tinggi militerisme sebagai *Way of Life*. Kemudian dia menyimpulkan bahwa kebebasan seseorang itu karena adanya jiwa berkorban, bahwa tujuan hidup manusia adalah "untuk mati" membela negara. Setiap warganegara harus siap berkorban untuk negara, nilainya sama dengan keberanian yang paling berharga. Kalau John Locke mengajarkan tentang: *Life, Liberty and Property* (Hidup, kebebasan dan kepemilikan), maka Hegel mengajarkan trilogi juga ialah: *Self sacrifice, duty and discipline* (pengorbanan diri, kewajiban dan disiplin).

Hegel adalah seorang yang mengkultuskan eksistensi negara. Baginya perorangan tidak ada artinya, yang ada ialah "negara". Dalam bukunya tentang Filsafat Sejarah (1837) Hegel mendefinisikan negara sebagai "realisasi kebebasan". Keberadaan Negara adalah untuk merealisasikan kehidupan moralitas, bahwa realitas moral yang dimiliki manusia hanya bisa berjalan lewat negara. Negara adalah aktualisasi yang paling sempurna bagi rasionalitas manusia, dan statement selanjutnya ialah bahwa negara adalah idea Ketuhanan yang ada di dunia. (agama sendiri tidak demiki-

an).

Inilah asal mulanya totalitarisme, bahkan jugu mengilhami fascisme dan Nazi Jerman nantinya. Hegel menolak dasar filsafat agama, seperti Kristen dan Yahudi, bahwa hati nurani manusia adalah di luar klaim otoritas politik. Tetapi Flegel berpendirian bahwa manusia mengambil semua realitas spiritualnya dari negara. Hukum Negara apa pun ujudnya adalah menifestasi dari jiwa yang obyektif, maka siapa yang taat hukum negara mereka akan menikmati kebebasannya. Dia menolak kebebasan ala liberalisme.

Kacamata Hegel tentang negara jelas mengkultuskan negara. Hegel menentang cara demokrasi, bahwa semua harus berpartisipasi dalam bisnis negara, dia menganggap hal itu jalan pemikiran yang mentertawakan. Dalam negara hanya ada dua aspek, pertama penguasa yang memiliki otoritas penuh dan kedua penyerahan mutlak secara instinktif seluruh warganegara. Bila dihadapkan kepada pilihan, demokrasi, aristokrasi atau monarki, maka yang terakhir menjadi pilihan Hegel dan menolak kedaulatan rakyat, yang mengikuti sistem kedaulatan rakyat adalah tanpa bentuk dan selalu buas.

Hegel menganjurkan sebuah negara model Prussia, tetapi ke-

tika dipertanyakan tentang keberadaan negara lain, apakah bisa hidup bersama, maka dia menjadi anarkis dan nihilis. Dia memberikan solusi yang mengekankan, ialah bahwa bila bangsa lain tidak setuju dengan sesuatu yang khusus yang kita miliki dan tidak bisa diharmoniskan, maka hanya bisa diselesaikan dengan "perang". Perang itu penting, karena sebuah negara yang terlalu lama dalam perdamaian akan berkecamuk di dalamnya berbagai korupsi, kemudian terjadi stagnasi dan krisis. Perang akan menjadikan komunitas politik menjadi sehat, bugar kembali. Perang akan menjadi pendorong penting terhadap kuatnya persatuan dan keutuhan negara nasional. Bangsa jadi kuat karena damai di dalam dan perang di luar. Hal ini diikuti Otto von Bismarck ketika memimpin Negara Jerman, sehingga dalam buku catatannya dia menulis antara lain sebagai berikut: "Perang adalah satu-satunya cara menghidupkan kembali dan memelihara loyalitas rakyat, terutama kelas huruh yang terinfeksi cita-cita sosialisme interansional".

Akhimya Hegel mendorong agar hidup bangsa dijiwai oleh pemujaan kepada pemimpinnya. Negara perlu pemimpin yang kuat. Tiap epoch sejarah, ada misi negara tertentu bagi pemi-

kiran dunia. Menang perang berarti memiliki jiwa dunia, kalah berarti tidak.

Dalam pembenahan masalah otoritas politik atau sovereinitas negara memang sebenarnya Jerman agak tertinggal dari Perancis maupun Inggris. Hampir seratus tahun sebelum Hegel, seorang pemimpin Perancis Montesquieu (1689-1755) bertolak belakang dengan pendapat Hegel, karena dia mementingkan peran hukum dalam Negara.

Dalam karya besarnya "De l'esprit des lois" (1748) Montesquieu melihat manusia sebagai pemilik rasio akan selalu berfikir rasional, juga dalam hal negara, sehingga manusia membuat hukum secara bersama untuk mengatur komunitas politik yang dibangunnya. Hukum adalah produk komunitas politik yang telah melalui proses rasionalisasi, dipikirkan dalam istilah yang universal. Ketika manusia sudah menyusun masyarakat, maka diciptakanlah tiga jenis hukum: (1) hukum antar-bangsa/negara yang mengatur saling hubungan antar-bangsa/negara itu. (2) Hukum politik, yang mengatur hubungan antar-pemerintah dengan yang diperintah, berupa konstitusi, hukum publik dan hukum administrasi, dan (3) hukum sipil, yang mengatur hubungan antar-penduduk/warganegara, berupa hukum sipil,

perjanjian-perjanjian dan lain-lain.

Manusia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan hukum, lebih-lebih dalam bernegara, demikian pendapat Montesquieu. Hukum adalah reason yang mengikat dan mengatur masyarakat manusia sendiri, sekalipun dalam hubungan mon-dial. Karenanya aplikasi hukum menjadi sangat penting. Hukum harus relevan dengan iklim manusia yang akan memakai hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum harus dibuat oleh manusia sendiri, sekalipun akhirnya nanti mengikat manusia juga. Dalam politik memang Montesquieu terantisipasi pemikiran sebelumnya, seperti Aristoteles, Polybius, Jean Bodin dan lainn-lain.

Terutama dalam hukum negara, doktrin pemisahan kekuasaan dari Montesquieu sangat terkenal, yakni Trias Politica, juga dia elaborasi dalam bukunya "Jiwa Hukum" tersebut. Kekuasaan eksekutif harus bebas dari kekuasaan legislatif, kekuasaan kehakiman juga harus berdiri sendiri. Ia memuji apa yang sedang dilaksanakan di Inggris. Pendapat Montesquieu tersebut nantinya akan menjadi pedoman banyak negara modern di dunia.

Bentuk dan Sistem Negara adalah Keputusan Politik

Kalau kita sejenak menengok ajaran agama, khususnya Islam ada firman Tuhan dalam Surat Al Hujurat 13, berbunyi: "Wahai sekalian manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan Kami jadikan kalian berbangsa dan ber-suku agar kalian saling mengerti, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Tuhan ialah kalian yang paling bertaqwa, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Menenal".

Ayat tersebut dibacakan Rasulullah s.a.w. ketika berpidato di hadapan jama'ah setelah kembali ke Mekah dari Hijrahnya ke Madinah. Di sini nabi mengingatkan agar masyarakat menegakkan saling menghargai, tanpa melihat asal kabilah dan bangsanya. Agar ditegakkan hidup kerukunan, dan mengedepankan taqwa, yang berarti moralitas yang terpuji. Dengan demikian sebenarnya mengisyaratkan perlunya kebebasan berfikir dalam pergaulan manusia di dunia, sedang yang membimbing manusia adalah ukuran moralitasnya. Tentang *mutual understanding* itu, di tempat lain pernah nabi bersabda, menurut Hadist Abu Hurairah: "Sesungguhnya Tuhan tidak akan me-

mandang pada bentuk rupa kalian atau harta benda kalian, akan tetapi Tuhan akan memandang: isi hati kalian dan bukti perbuatan kalian". Di sini moralitas agama jelas mengarah kepada persamaan hak, tanpa melihat kekayaan atau keturunan seseorang, yang penting tegaknya etika berpolitik antar manusia.

Negara termasuk bentuk dan sistem pemerintahannya adalah urusan ta' aruf atau *mutual understanding* antar-manusia sendiri, agar terjadi harmoni dalam kehidupan berkomunitas politik. Oleh karena itu bentuk maupun sistem Negara diserahkan sepenuhnya pada keputusan politik bersama dalam masyarakat. Agama hanya memberikan panduan moral yang terbaik bagi manusia, sedang isi moralnya akan tetap sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia sendiri, sebab agama sebenarnya hanya akan memperjelas fitrah atau nurani yang telah ada dalam lubuk hati manusia sendiri.

Apabila kita menengok ke belakang, terutama ketika revolusi Perancis, sebab saat itulah saat bangkitnya konsep negara modern; ada tiga tokoh yang perlu disoroti: Montesquieu dan Voltaire adalah dua tokoh konservatif liberal dari kelas atas, sebenarnya sebagai penghalang revolusi bukan pendorongnya,

mereka lebih condong setuju model Inggris yang memuat revolusi politik secara damai dan parlementer, tidak melalui revolusi fisik. Montesquieu terkenal dengan teori pemisahan kekuasaan, trias politika, sedang Voltaire tidak begitu acuh terhadap bentuk negara dan sistem pemerintahannya, dia hanya memperjuangkan kebebasan intelektual, sekalipun singa yang memerintah. Dia lebih suka taat kepada seekor singa yang baik daripada 200 tikus yang korup. Tetapi bagi Voltaire, negara harus menegakkan hukum secara benar.

Tokoh ketiga ialah Jean Jacques Rousseau (1712-1778) berasal dari kalangan bawah, rakyat jelata miskin. Orang asal gelandangan ini, ternyata gigih menuntut ilmu secara inkonvensional, dan berhasil diakui sebagai pemikir politik di kemudian harinya. Teorinya terkenal tentang "*Liberte', Egalite' dan Fraternite'*" (Kebebasan, Persamaan dan Persaudaraan), namun seterusnya dia mengatakan bahwa: *L'homme est ne' libre et paetout dans les fe'rs.* (Bahwa manusia itu lahir bebas, namun kebanyakan kemudian terbelenggu). Karena dia melihat hukum dibuat oleh yang berkuasa untuk melindungi si kaya, dan si miskin selalu tertindas, maka kemudian dia mengeluarkan pendapat perlunya

pemerintahan negara dibentuk secara “perjanjian masyarakat”, isinya adalah hak-hak yang jelas bagi seluruh komunitas politik. Rousseau menginginkan semacam “*civil society*” yang diinspirasi oleh keadilan dan moralitas.

Bagi Rousseau kedaulatan adalah terlaksananya konstitusi bagi komunitas politik yang telah dibentuk lewat perjanjian masyarakat (*Du contrat social*). Kedaulatan adalah hak rakyat yang tak terpisahkan, tujuan akhirnya ialah pemerintahan sendiri yang mengatur dirinya sendiri. Bagi Rousseau, pemerintah adalah -bukan sebagai pemilik kedaulatan- akan tetapi sebagai “Agen sementara”. Pendapat ini sama dengan pendapat Locke, rakyat kemudian mentransfer pelaksanaan otoritas tertinggi, berupa yudisial, eksekutif dan legislatifnya pada organ-organ Pemerintahan.

Dari uraian itu jelas kiranya bahwa akhirnya bentuk dan sistem pemerintahan adalah terletak di tangan rakyat, sebagai ujud komunitas politik. Terutama di dalam sistem demokrasi, maka kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan mereka yang menentukan bentuk maupun sistem yang berjalan dalam negara dan pemerintahannya.

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai Negara

Dalam seminar yang diadakan LPPKB bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, di Jakarta tahun 2001 yang lalu, antara lain telah berhasil merumuskan NKRI sebagai negara-bangsa, yang kami kutibkan antara lain sebagai berikut: “NKRI sebagai entitas negara-bangsa ternyata telah memenuhi kriteria negara-bangsa secara fundamental, sebagai berikut: (1) Memiliki pemerintahan sendiri yang bebas, sah dan berdaulat, (2) Memiliki teritorial geopolitik sendiri, (3) Memiliki sistem keyakinan politik dan hukum sendiri, (4) Memiliki simbol-simbol kebangsaan sendiri, (5) Memiliki sekelompok penduduk yang menyusun suatu bangsa, (6) Merasa senasib dan sepenanggungan, (7) Memiliki ikatan kesatuan historis sosiokultural sendiri, (8) Memiliki kesamaan identitas dan jiwa serta wawasan kebangsaan sendiri, (9) Kesatuan dan persatuan terus-menerus dipupuk dalam perkembangan kehidupan sejarah bangsa dan negara Indonesia, dan (10) Keberadaan NKRI sebagai negara-bangsa telah diterima dan diakui dunia internasional.

NKRI adalah sebagai contoh eksistensi sebuah negara, yang

berdirinya karena komunitas politik Indonesia menghendaki adanya, setelah perjuangan lama melawan penjajahan. Sepuluh kriteria tersebut adalah merupakan akumulasi persyaratan yang diperlukan, kalau dilihat dari sejarah awalnya di zaman Yunani mungkin masih sangat sederhana bagi berdirinya sebuah polis.

Suatu kenyataan, bahwa Indonesia ketika berdirinya sebagai negara yang merdeka berdaulat - bahkan hingga saat ini - adalah sebagai bangsa yang pluralis, artinya terdiri dari berbagai suku bangsa, etnisitas, pemeluk agama yang berbeda-beda, adat-istiadat budaya yang multi-kompleks, serta faham kesadaran intelektualitas yang beraneka ragam, namun secara komunitas politik adalah satu, bahkan perbedaan-perbedaan itu merupakan mosaik kekayaan budaya yang memperkokoh kesatuan bangsa dalam entitas Negara Keseluan Republik Indonesia.

Oleh karena itu eksistensi NKRI merupakan nessesitas publik yang tidak bisa dielakkan lagi. Nessesitas berarti bahwa memang kondisi yang menghendaki bahwa NKRI harus ada, sedang publik berarti bahwa eksistensi NKRI adalah bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi hanya melihat kepentingan pribadi akan tetapi bagi

kebaikan seluruh komunitas politik bangsa Indonesia. Dengan kata lain, bahwa komunitas politik Indonesia memang memerlukan NKRI, bagi mewujudkan cita-cita nasional bersama, yakni terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekarang terpulang kepada bangsa Indonesia sendiri, yang telah berhasil menyusun bentuk dan sistem negara sehingga dihasilkan seperti NKRI sekarang ini, untuk mengembangkannya sesuai cita-cita nasional yang disepakati bersama, dengan sadar-sadarnya menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada, tanpa mengorbankan keutuhan negara, tetapi sebaliknya justru bisa memperkuat.

Apakah Eksistensi Negara Abadi?

Sebagai uraian terakhir, marilah kita mencoba menjawab sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik, apakah eksistensi negara itu abadi. Mengapa K. Omahe pernah mencetuskan tesis tentang "*The end of the Nation State*". Dan dalam era globalisasi sekarang ini mulai ada orang yang mempertanyakan keperluan masih adanya negara, tidaklah cukup dengan sebuah organisasi internasional saja yang mengaturnya. Dalam ajaran Marxisme juga ada ajaran yang meniadakan perlunya negara,

setelah perjuangan melawan kapitalisme berhasil dan terwujudnya masyarakat tanpa kelas, walaupun pada kenyataannya belum pernah ada di negeri komunis mana pun di dunia ini, yang menegasi adanya negara.

Tampaknya suatu kemustahilan untuk meniadakan Negara, karena negara sebenarnya adalah sebuah organisasi yang diperlukan bagi komunitas politik, sedang komunitas politik tidak akan lenyap atau berakhir dengan masih adanya manusia.

Kembali kepada kisah Yunani, tentang *zoon politikon*, memang sejak awal memerlukan organisasi yang disebut negara, sebagai kelanjutan organisasi tradisional "keluarga", kemudian berkembang menjadi organisasi "desa atau kampung", seterusnya menjadi organisasi "polis" atau "negara kota", diteruskan di abad 17 realisasi sebagai "Negara-Bangsa" setelah muncul konsep geopolitik. Sekarang ini kita semua berada dalam periode "Negara-Bangsa" ini. Karena peperangan besar, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II, mungkin sekali karena pengaruh ajaran Friedrich Hegel, tentang perang, sehingga dunia terjerumus dalam kemelutnya perang dunia yang memakan korban jutaan manusia itu.

Liga Bangsa-bangsa dibentuk setelah Perang Dunia I, kemudi-

an dipertegas setelah berakhirnya perang dunia kedua dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai organisasi dunia yang bertugas menjaga perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia. Adanya PBB ternyata tidak menafikan masih eksistensinya Negara-Bangsa.

Yang jelas sekarang "Negara-Kota" sudah tidak ada lagi, yang ada adalah "Negara-Bangsa", bahkan di Amerika Serikat istilah *state* sama dengan Negara Bagian, sedang gabungan *state* menjadi "Negara Federal". Memang suatu pertanyaan apakah di kemudian hari bisa terbentuk "Negara Mondial" atau "Negara Global", tetapi barangkali terbentuk setelah manusia berhasil membangun negara di Bintang Mars atau Yupiter, sehingga terbentuk hubungan tidak hanya internasional, tetapi antar-negara planet. Ini pun sangat tergantung tantangan baru yang akan dihadapi manusia tentang kemungkinan adanya makhluk lain sejenis manusia di planet lain.... Mungkin saja terbentuk Negara-negara baru yang berskala planet Matahari atau "Negara Planet".

Surat Ar-rahman, ayat 33 menantang manusia sebagai firman Tuhan S.W.T. berikut: "Hai kelompok jin maupun manusia, apabila kalian memang mampu

menerobos/melintasi sudut-sudut langit dan bumi maka lintasilah, kalian tidak akan bisa melintasi kecuali dengan kekuatan". Apabila datang masanya manusia memiliki kemampuan melintasi sudut-sudut langit, mungkin saja otoritas manusia bisa berkembang di sudut-sudut langit yang lain. Tetapi komunitas politik manusia tetap akan memerlukan organisasi yang disebut negara tadi.

Negara tetap akan merupakan nessesitas publik bagi komunitas politik manusia apa pun namanya, apakah itu "Negara-Kota", "Negara-Bangsa", "Nega-

ra-Planet" atau malah mungkin "Negara-Galaxy" hanya masanya yang bertambah besar, tetapi intinya sama, inilah negara bagi komunitas politik.

Aspek kehidupan bagi komunitas politik memang multi-dimensional, mulai dari etika, hukum, politik sendiri, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, komunikasi, transportasi dan lain-lainnya, yang tampak makin kompleks, selain keamanan bagi kelangsungan hidup komunitas itu sendiri. Makin besar massa komunitas politik yang bersangkutan akan makin besar dan kompleks keperluan survivalnya.